

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah Kesehatan Stunting di Indonesia masih cukup tinggi sehingga di butuhkan penanganan yang penting terhadap penurunan stunting. Menurut World Health Organization (WHO) Anak-anak yang mengalami stunting mungkin tidak akan mencapai tinggi badan optimal dan perkembangan otak mereka mungkin tidak akan berlangsung secara maksimal ke potensi yang sepenuhnya. Dari 148,1 juta anak yang mengalami stunting pada saat ini di perkirakan jika terjadi kesenjangan atau tidak terjadi penurunan sesuai target hanya 39,6 juta atau 13,5% dari target 89 juta yang dapat tercapai pada tahun 2030 (WHO, 2023).

Berdasarkan Angka stunting SSGI menunjukkan penurunan dari 24.4% di tahun 2021 dan mengalami kemajuan\penurunan menjadi 21,6% di tahun 2022, Tetapi harus terus perlu perununan disetiap tahunnya sekitar 3,8% pertahun untuk mencapai target 14% tahun 2024 di Indonesia dengan berpedoman bahwasannya pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG), persentase balita dengan gizi buruk di Sumatera Utara pada tahun 2021 mencapai 25,8%, sementara pada tahun 2023 prevalensinya turun menjadi 16,9%. Namun, pencapaian pada tahun 2022 ini masih belum memenuhi target WHO, yaitu sebesar 14%. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Pada saat ini pemerinah mengupayakan untuk menurunkan prevelensi stunting dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencakup percepatan

penurunan stunting melalui indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. (Kementrian PPN/Bappenas, 2024).

Menurut Profil kesehatan, Beberapa kabupaten atau kota di Sumatera Utara yang menjadi fokus penelitian stunting dan memerlukan perhatian khusus adalah Langkat, Padang Lawas, dan Gunung Sitoli. Pada kabupaten langkat dengan prevelensi di tahun 2021 menduduki 31,5 % , pada tahun 2022 prevelensi sebesar 18,6 % dan pada tahun 2023 sebesar 16,9 % tetapi belum mencapai target ketetapan WHO sebesar 14 % (Risksdas, 2020).

Kabupaten Langkat menghadapi permasalahan stunting yang menjadi fokus perhatian Baik di tingkat nasional maupun lokal, beberapa daerah, termasuk Langkat, Padang Lawas, dan Gunung Sitoli, masuk dalam 100 wilayah yang mendapatkan perhatian khusus untuk program intervensi gizi dalam upaya penanganan stunting. Teridentifikasi 10 desa di Kabupaten Langkat sebagai prioritas nasional untuk penanganan stunting. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Langkat telah mengeluarkan Peraturan Bupati Langkat No. 10 Tahun 2018 dengan tujuan mengurangi angka stunting di wilayah tersebut. (Purnama & Salamuddin, 2021).

Dari data yang didapatkan pada survei awal di puskesmas tangkahan durian di tahun 2022 terdapat 8 kasus balita stunting dan meningkat di tahun 2023 menjadi 18 kasus balita stunting yang perlu menjadi perhatian dan adanya penanganan stunting karena terjadi peningkatan pada kasus stunting diwilayah puskesmas Tangkahan Durian.

Terdapat indikator pencapaian intervensi gizi sensitif di wilayah kerja puskesmas Tangkahan Durian yaitu Cakupan air bersih seperti penyediaan air

minum yang aman 90 % tetapi untuk Prilaku sanitasi yaitu STBM pada wilayah kerja puskesmas masih di presentase 41% yang menandakan masih ada masalah terhadap sanitasi perilaku yaitu pada prilaku Rumah tangga yang lebih banyak tidak menerapkan PHBS.

Selanjutnya pada remaja perempuan usia yang dianjurkan untuk menikah yaitu 21 tahun dan jumlah remaja yang mengalami kehamilan ada 3 orang dengan usia yang masih dibawah usia yang dianjurkan 2 orang berusia 17 tahun dan 1 orang berusia 16 tahun.

Dalam upaya meningkatkan pendidikan gizi masyarakat, Puskesmas Tangkahan Durian Kabupaten Langkat telah mengimplementasikan berbagai kegiatan promosi kesehatan. Berdasarkan data terbaru, pendidikan gizi masyarakat pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap PHBS, meliputi cuci tangan pakai sabun dan air bersih 89,8%, Rumah tangga berPHBS 49,3 % dan Rumah tangga tidak berPHBS 61,55% yang berarti lebih banyak rumah tangga yang tidak menerapkan PHBS di dalam Rumah tangganya sehingga dapat memicu timbulnya angka stunting yang baru.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada Pasal 1 ayat 4, mendefinisikan stunting sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, yang dapat diukur dengan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan standar umur. Untuk mengatasi hal ini, berbagai upaya dilakukan melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja multisektor di tingkat pusat, daerah, dan desa. Pada Pasal 5 ayat 1, ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024

dalam rangka pencapaian target nasional.

Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang penurunan stunting menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai panduan bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam mempercepat upaya penurunan angka stunting di daerah tersebut. Pemerintah berperan sebagai pengarah, regulator, dan pelaksana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui strategi ini.

Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 16 Tahun 2018 memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan di tingkat desa, termasuk upaya penurunan stunting. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk mendukung program-program yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk intervensi gizi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 menyoroti penanganan stunting sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan di tingkat desa. Berbagai inisiatif untuk mengatasi stunting diimplementasikan melalui peraturan ini, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan yang terarah dan berkelanjutan. (Prihatini & Subanda, 2020).

Implementasi konvergensi dalam program pencegahan stunting secara terintegrasi sudah merupakan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini mengatur pelaksanaan intervensi yang terkoordinasi dari berbagai sektor untuk mengatasi masalah stunting secara menyeluruh dan efektif. Kebijakan Strategis

Pangan dan Gizi dalam pencegahan stunting di Indonesia memerlukan konvergensi yang mengintegrasikan kegiatan program rutin dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Konvergensi ini menjadi salah satu pilar utama dalam strategi nasional untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting, memastikan koordinasi dan integrasi yang efektif antara berbagai sektor dan program. (Permanasari et al., 2020).

Stunting Summit adalah pertemuan nasional yang diadakan untuk pertama kalinya di Indonesia dengan tujuan mendorong percepatan penurunan stunting. Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting yang terintegrasi di kabupaten/kota prioritas dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. (Rahmadhita, 2020).

Menurut (Sari, 2023) Intervensi gizi sensitif adalah program penting dalam penurunan stunting yang perlu dilaksanakan dengan baik. Kegiatan dalam program ini meliputi peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman, peningkatan kesadaran dan praktik terkait pengasuhan serta gizi ibu dan anak, perbaikan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta peningkatan akses terhadap pangan bergizi.

Menurut (Regita et al., 2023) Ketahanan pangan, sebagai salah satu intervensi gizi sensitif, tetap menjadi faktor utama dalam pencegahan stunting di daerah perdesaan. Akses pangan atau keterjangkauan mengacu pada kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan bergizi dalam jumlah yang cukup melalui berbagai sumber, seperti produksi atau pasokan sendiri, pembelian, dan bantuan pangan.

Intervensi gizi sensitif memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap

penurunan stunting, yakni sebesar 70%, dibandingkan dengan intervensi gizi spesifik yang hanya 30%. Intervensi gizi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan atau program pembangunan yang melibatkan beberapa sektor, bukan hanya sektor kesehatan (Sutraningsih et al., 2021). Akses terhadap air bersih merupakan faktor protektif terhadap kejadian stunting pada balita, sedangkan akses air bersih yang tidak layak dapat menjadi faktor risiko stunting. (Mitha Adzura, 2021).

Implementasi kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting dapat dianalisis menggunakan teori implementasi George Edward III, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi sudah terjalin oleh beberapa lintas sektor namun masih belum ada sosialisasi terkait salah satu kegiatan intervensi gizi sensitif. Hal ini bisa dikatakan sebagai miskomunikasi artinya masyarakat gagal dalam menerima pesan kesehatan pada salah satu kegiatan tersebut, kurangnya sosialisasi, sehingga pencegahan stunting dapat kurang optimal.

Dalam implementasinya, berbagai sumber daya dikerahkan di desa Tangkahan Durian, baik dari Puskesmas maupun Posyandu, untuk mengatasi permasalahan stunting. Tetapi saat di lapangan di duga para sumber daya manusia yaitu pihak pelaksana dalam stunting mereka tetap memiliki kendala salah satunya kader yang masih banyak melakukan kesalahan pada saat pelaksanaan pengukuran tinggi dan berat badan balita dan kurangnya dana yang diberikan.

Pada disposisi dapat dikatakan pihak puskesmas melaksanakan kegiatan sudah sesuai dengan prsedure dan cukup mendapatkan dukungan pemerintah.

Selanjutnya pada struktur Birokrasi, Seluruh petugas kesehatan dan Di wilayah kerja Puskesmas Tangkahan Durian, terdapat non-petugas kesehatan yang terlibat dalam penanganan stunting. Namun, diduga masih ada beberapa kekurangan, seperti persentase pelaksanaan yang belum memenuhi target dan distribusi pelaksanaan yang kurang merata.

Penelitian ini akan difokuskan pada intervensi sensitif dalam penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Tangkahan Durian, Kabupaten Langkat. Studi sebelumnya telah banyak mengkaji efektivitas program 1000 HPK melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, namun penelitian ini akan mengalokasikan perhatian khusus pada implementasi intervensi gizi yang sensitif dalam konteks yang berbeda.

Keterbatasan informasi mengenai implementasi kebijakan ini di Puskesmas Tangkahan Durian Kabupaten Langkat menunjukkan perlunya penelitian terbaru yang dapat memberikan bukti yang lebih strategis dan tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan strategi intervensi gizi yang efektif untuk mengatasi masalah stunting di tingkat lokal, khususnya di wilayah Puskesmas Tangkahan Durian.

Gizi sensitif masih menjadi sasaran masalah karena berkaitan dengan kejadian stunting karena bersangkutan dengan fokus pada keluarga dan umum, baik dari sektor kesehatan maupun non kesehatan, apabila Ada kesenjangan terhadap pengimplementasian kebijakan khususnya gizi sensitif akan mempengaruhi pencapaian target nasional pada angka stunting Maka, penulis tertarik melakukan studi dengan judul "Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi

Sensitif Terhadap Penanganan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Tangkahan Durian, Kabupaten Langkat“.

1.2 Fokus Kajian Penelitian

Intervensi gizi sensitif memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penanganan stunting, yakni sebesar 70%, dan mencakup lebih dari sekadar sektor kesehatan. Fokus kajian penelitian adalah bagaimana Implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif terhadap penanganan stunting di wilayah kerja puskesmas Tangkahan Durian kabupaten langkat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk Menyelidiki implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Tangkahan Durian, Kabupaten Langkat. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana kebijakan ini diimplementasikan secara praktis di lapangan, termasuk strategi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang telah dicapai dalam mengurangi angka stunting di komunitas tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi pengambil kebijakan dan praktisi kesehatan terkait untuk meningkatkan efektivitas program intervensi gizi sensitif di tingkat lokal.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif terhadap penanganan stunting di wilayah kerja puskesmas Tangkahan Durian, Kabupaten Langkat berdasarkan persiapan, monitoring dan pelaporan mencakup

beberapa kegiatan dan cakupannya:

- 1) Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak
 - 2) Ketahanan pangan dan gizi
 - 3) Keluarga Berencana (KB)
 - 4) Jaminan kesehatan masyarakat
 - 5) Jaminan kesehatan dasar
 - 6) Fortifikasi pangan
 - 7) Pendidikan gizi masyarakat
 - 8) Remaja perempuan
 - 9) Pengentasan kemiskinan
2. Komunikasi antara pihak pelaksana dengan sektoral, aparat desa dan ibu balita stunting dan ibu hamil di Puskesmas Tangkahan Durian berdasarkan kegiatan intervensi gizi sensitif:
- 1) Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak
 - 2) Ketahanan pangan dan gizi
 - 3) Keluarga Berencana (KB)
 - 4) Jaminan kesehatan masyarakat
 - 5) Jaminan kesehatan dasar
 - 6) Fortifikasi pangan
 - 7) Pendidikan gizi masyarakat
 - 8) Remaja perempuan
 - 9) Pengentasan kemiskinan
3. Sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan intervensi gizi sensitif untuk penanganan stunting di Puskesmas Tangkahan Durian

mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana yang dialokasikan untuk kegiatan intervensi gizi sensitive :

- 1) Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak
 - 2) Ketahanan pangan dan gizi
 - 3) Keluarga Berencana (KB)
 - 4) Jaminan kesehatan masyarakat
 - 5) Jaminan kesehatan dasar
 - 6) Fortifikasi pangan
 - 7) Pendidikan gizi masyarakat
 - 8) Remaja perempuan
 - 9) Pengentasan kemiskinan
4. Disposisi dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif di puskesmas Tangkahan Durian mencakup kesediaan dan sikap pelaksana untuk melaksanakan program dengan baik dengan kegiatan intervensi gizi sensitif:
- 1) Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak
 - 2) Ketahanan pangan dan gizi
 - 3) Keluarga Berencana (KB)
 - 4) Jaminan kesehatan masyarakat
 - 5) Jaminan kesehatan dasar
 - 6) Fortifikasi pangan
 - 7) Pendidikan gizi masyarakat
 - 8) Remaja perempuan
 - 9) Pengentasan kemiskinan

5. Struktur birokrasi meliputi prosedur dan dukungan yang diperlukan untuk penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Tangkahan Durian melalui kegiatan intervensi gizi sensitif.

- 1) Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak
- 2) Ketahanan pangan dan gizi
- 3) Keluarga Berencana (KB)
- 4) Jaminan kesehatan masyarakat
- 5) Jaminan kesehatan dasar
- 6) Fortifikasi pangan
- 7) Pendidikan gizi masyarakat
- 8) Remaja perempuan
- 9) Pengentasan kemiskinan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menganalisis tenaga kesehatan serta pemangku kebijakan, terutama dalam pelaksanaan intervensi gizi sensitif yang seharusnya berjalan dengan baik.

1.4.2 Bagi Petugas Kesehatan

Bisa dipakai menjadi masukan sebagai upaya penanganan stunting untuk penurunan stunting secara optimal.

1.4.3 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat

Bisa dipakai sebagai saran untuk menjalankan kebijakan Yang lebih serius untuk mencapai target penurunan stunting tahun 2024.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan kesadaran mengenai intervensi sensitif untuk masyarakat sebagai sasaran program penanganan stunting.

